

MELIHAT LEBIH DEKAT KONTRIBUSI AKTIVISME TRANSNASIONAL TERHADAP DEMOKRASI DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Yusnarida Eka Nizmi
Dosen Fisip-HI Universitas Riau
eka_nizmi@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk memberikan wacana baru mengenai persoalan aktivisme politik dalam konteks transnasional dengan memaparkan sebuah analisis yang berhubungan dengan masalah-masalah demokrasi. Riset-riset terdahulu minim elaborasi analisis mengenai masalah demokrasi, baik mengenai hubungan antara peluang politik bagi aktivisme transnasional dan aktivis yang menjadi bagian dari perjuangan demokrasi, termasuk juga minim bahasan mengenai masalah demokrasi dan ketidaksetaraan dalam jaringan transnasional dan prospek bagi demokrasi transnasional. Cara terbaik untuk melakukan riset mengenai aktivisme transnasional adalah dengan melakukan analisis yang komprehensif mengenai aktivisme transnasional dalam konteks power dan hubungannya dengan masalah-masalah demokrasi. Namun terlebih dahulu, yang utama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan konsep “aktivisme transnasional”- dengan harapan mendapatkan poin kunci untuk melakukan riset mengenai gerakan sosial, NGOs, dan aktor-aktor civil society yang beroperasi melintasi batas negara.

Kata Kunci: *Aktivisme Transnasional, Gerakan Sosial, Masyarakat Sipil, Demokrasi, Lintas Batas.*

Abstract

The purpose of this paper is to show a new discourse about activism politics in transnational context by describing an analysis which is related to democracy issues. The previous researches are lack of analysis elaboration in democracy issues, both political opportunity for transnational activism and activists who belong to democracy struggle. The inequality of transnational networks and the future of transnational democracy are also lack of touchable analysis. The best way to do research about future for transnational activism is by analyzing transnational activism in power and its correlation with democracy issues comprehensively. The main priority is to define transnational activism concept in order to get the key point to do research about social movements, NGOs and civil society actors who operates cross borders.

Key Words: Transnational Activism, Social Movements, Civil Society, Democracy, Cross Borders.

Pendahuluan

Proses globalisasi tidak hanya murni melibatkan aspek ekonomi dan elit-elit politik. Interaksi lintas batas antar aktor-aktor masyarakat sipil (*globalization from below*) (Falk 1999; Appadurai 2000)- adalah salah satu fenomena dalam dunia politik kontemporer untuk menerima tingginya perhatian media dan dunia akademik. Ketika NGO dan gerakan sosial tidak hanya fokus pada wilayah domestik atau lokal namun juga bertindak melewati batas-batas negara, disitulah aktivitas transnasional meningkat. Aktivitas politik transnasional menantang pemahaman konvensional mengenai civil society dan gerakan sosial termasuk juga hubungan internasional.

Aktivisme transnasional secara sejarah bukanlah sebuah fenomena baru. Aktor-aktor masyarakat sipil konsen dalam isu yang melibatkan aktivitas lintas negara setidaknya sudah ada sejak abad kesembilan belas (Keck and Sikkink 1998). Tulisan ini akan memfokuskan pada aktivisme transnasional, termasuk beragam jenis aktor. Aktivisme dalam aktivitas politik yang dapat dipahami adalah bahwa pertama, didasarkan pada konflik kepentingan dan keberlangsungan negara. Kedua, melawan atau mendukung struktur power tertentu. Ketiga, melibatkan aktor-aktor non negara dan terakhir, aktif/terlibat diluar arena politik formal. Kriteria-kriteria ini membutuhkan beberapa elaborasi bagian dari eksekutif/bagian dari pemerintah parlementer (Keck and Sikkink 1998: 9). Konsep jaringan yang dipakai disini mirip dengan analisa “*network*

society” yang diungkap oleh Manuel Castells (1996). Jaringan dianggap sebagai sebuah bentuk baru sosial yang didasarkan pada tipe pertukaran- terutama pada informasi-antara para aktor yang berlokasi tidak di tempat/ruang/wilayah yang sama. Jaringan ini mengatur pertukaran-pertukaran informasi yang berhubungan dengan ekonomi, politik atau sosial yang relevan dari aktor-aktor tertentu didasarkan pada keterlibatan mereka dalam sebuah jaringan yang kuat.

Jaringan advokasi transnasional dicirikan oleh kerja advokasi mereka. Advokasi secara umum dipahami sebagai sebuah tindakan untuk mempengaruhi kebijakan. Jordan and van Tuijl (2000:2052) menjabarkan definisi yang lebih spesifik mengenai advokasi NGOs sebagai sebuah tindakan mengatur strategi penggunaan informasi untuk menyeimbangkan hubungan power yang tidak seimbang. Meskipun fokus pada strategi penggunaan informasi itu penting, definisi ini sepertinya menyamakan tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh semua aktivis NGOs. Padahal sudah disebutkan bahwa tidak semua NGOs terlibat dalam kerja advokasi yang ditujukan untuk demokratisasi. Advokasi NGOs mungkin bisa merangkum keseluruhan spektrum tujuan dari demokrasi sampai anti demokrasi dan kita juga tidak bisa mengasumsikan seluruh agenda NGOs pro demokrasi adalah sama. Termasuk juga menurut Jordan van Tuijl (2000: 2053) bahwa kita tidak boleh berasumsi bahwa semua NGOs menentang status quo. Sebagai tambahan dalam pemahaman advokasi, para aktivis transnasional bisa juga terlibat dalam mengawasi aktivis lainnya (misal terkait dengan hak asasi manusia) dan dalam memberikan layanan jasa (Florini 2000a: 213).

Pembahasan

Kajian Aktivisme Transnasional Dalam Berbagai Perspektif

Kajian aktivisme transnasional merupakan studi yang penting secara general karena melibatkan beragam disiplin ilmu. *Pertama*, studi hubungan internasional (HI), yang menyajikan paradigma negara sebagai aktor utama dalam sistem politik internasional yang anarki, dan kehadiran aktor-aktor non negara dalam politik internasional. Risse Kappen (1995), memaparkan tulisan Keohane dan Nye yang ditulis pada tahun 1970an, cukup membantu untuk memahami perspektif ini. Keck and Sikkink (1998) juga berpartisipasi untuk menjelaskan kajian aktivisme transnasional, yang juga diikuti oleh yang lain (e.g. Risse, Ropp and Sikkink 1999; Scholte 1999; O' Brien et al. 2000; Khagram, Riker and Sikkink 2002b).

Kedua, studi aktivisme transnasional dari perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI) yang memfokuskan pada isu power dan otoritas dalam sistem internasional (Higgot et al. 2000) serta kecenderungan aktivisme transnasional sebagai resistensi terhadap globalisasi neo-liberal (Mittelman 1999; Gills 2000).

Ketiga, tulisan dari perspektif yang berbeda, pakar sosiologi dan politik yang tertarik mengulas gerakan sosial yang berkembang menjadi gerakan transnasional atau meluas pada level global (Markoff 1996; Smith et al. 1997; Smith and Johnston 2002; Rucht 1999; Rucht 2001; *Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen* 2002; Tarrow 1998; 2001; 2002; della Porta et al. 1999; Cohen and Rai 2000; Guidry, Kennedy and Zald 2000b; Hamel et al. 2001).

Keempat, politik dan studi pembangunan juga termasuk bagian dalam bahasan studi aktivitas non governmental organization (NGO), yang jarang masuk dalam literatur gerakan sosial secara eksplisit (e.g. Princen and Finger 1994; Hulme and Edwards 1997; Boli and Thomas 1999; Jordan and van Tuijl 2000; Uvin 2000). Kategori riset ini didasarkan pada studi empiris NGO dalam berbagai isu. Tema ini juga menjadi karakter publikasi mengenai transnasional atau global civil society (Florini 2000b; Warkentin 2001) and ‘global citizen action’ (Edwards and Gaventa 2001). ‘Global Civil Society Yearbook’ (Anheier et al. 2001) juga memaparkan isu ini untuk memetakan aktivitas-aktivitas “global civil society”.

Kelima, beberapa studi mikro antropologi dari aktivisme transnasional menawarkan pandangan yang menarik dari level masyarakat bawah (Braman and Sreberny-Mohammadi 1996; Smith and Guranizo 1998; Riles 2000; Fortun 2001; Burawoy et al. 2000). *Keenam*, teori politik, memiliki sejumlah teori yang berusaha untuk mengusung teori bagi aktivisme transnasional yang tidak tersedia dalam studi-studi lain. Teori-teori transnasional/global/ international civil society dipakai baik oleh versi liberal (Kaldor 1999) maupun neo- Marxist (Colas 2002). Studi ini juga berhubungan dengan “demokrasi kosmopolitan” (Held 1995) dan transnasional/masyarakat global (Delanty 2000). *Ketujuh*, riset aktivisme transnasional dari perspektif hukum internasional (Cullen and Morrow 2001).

Terakhir, ada banyak teks tertulis dari perspektif aktivis yang berkontribusi untuk memahami perkembangan gerakan sosial global melawan “globalization from above” (Brecher, Costello and Smith 2002). Meskipun ada beberapa riset yang tumpang tindih mengenai aktivisme transnasional (khususnya

antara studi HI mengenai aktor non negara dan teori gerakan sosial, namun dapat dikatakan bahwa aktivisme transnasional sudah menjadi riset studi yang multidisiplin. Secara keseluruhan tulisan ini mencoba untuk mengintegrasikan beragam perspektif tersebut.

Aktivisme Transnasional Dalam Dimensi Demokrasi

Hubungan antara aktivisme transnasional dan demokrasi sedikit sekali mendapat perhatian. Aktivisme transnasional sering diasumsikan memiliki dampak positif terhadap demokrasi- di negara-negara khusus yang menjadi target aktivis transnasional, termasuk juga target pada skala global- berhubungan dengan asumsi pentingnya masyarakat sipil global. Namun ada beberapa yang meragukan bagaimana sistem prodemokrasi berpengaruh terhadap agenda aktivisme transnasional. Ada kepentingan dalam masalah demokrasi dengan jaringan aktivis transnasional, namun sedikit sekali studi yang mengulas mengenai hal ini. Untuk mengkonsepkan aktivisme transnasional terkait dengan isu demokrasi, perlu terlebih dahulu mendiskusikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan demokrasi.

Kebanyakan riset mengenai isu demokrasi menggunakan definisi yang sempit mengenai demokrasi, dimana fokus utamanya terletak pada demokratisasi dari institusi politik formal. Jika definisi mengenai demokrasi yang lebih luas diterapkan, aktivisme politik informal yang dilakukan oleh aktor masyarakat sipil menjadi perlu untuk dikaji lebih lanjut, seperti misalnya penciptaan, perluasan dan praktek-praktek aktivisme melalui teritori nasional tertentu (Grugel 1999: 1).

Konsep masyarakat memiliki makna perjuangan power terkait dengan siapa yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Manfaat utama dari definisi ini adalah memperkenalkan sebuah perspektif power dan fokus pada hubungan sosial. Menurut pandangan ini, eksistensi institusi demokrasi secara formal, memang dibutuhkan, namun tidak cukup untuk menjalankan demokrasi secara menyeluruh. Demokrasi juga membutuhkan orang-orang populer yang konsisten dengan demokrasi, partisipasi yang dominan, akuntabilitas dan pelaksanaan hak asasi, toleransi dan pluralisme (Grugel 1999: 11-12).

Sebagaimana dengan konseptualisasi mengenai demokrasi secara sempit, pemahaman masyarakat mengenai demokrasi menjadi sesuatu yang sangat mendasar di era global dan interaksi transnasional yang semakin meningkat. Perkembangan masyarakat sipil erat kaitannya dengan proses demokratisasi, pemahaman transnasional dari masyarakat sipil menjadi penting bagi implementasi teori-teori demokratisasi. Tulisan ini mencoba untuk menginvestigasi bagaimana proses demokratisasi berhubungan dengan meningkatnya aktivisme transnasional masyarakat sipil. Proses demokratisasi memberi peluang terlibat dalam politik bagi masyarakat sipil secara umum, dan aktivisme transnasional sepertinya menjadi aspek penting dari perjuangan nasional untuk demokrasi. Aktivisme transnasional berpengaruh terhadap masalah-masalah demokrasi di tingkat lokal, nasional dan juga pada level transnasional. Pertanyaan-pertanyaan politik terkait dengan transnasionalisasi berhubungan erat dengan demokrasi dan negara bangsa yang berdaulat serta isu-isu demokrasi pada level transnasional- mungkin bisa menjadi sebuah model

“demokrasi kosmopolitan” (Held 1995). Terakhir, harusnya ada perhatian terhadap masalah-masalah demokrasi dan jaringan transnasional dan diskusi-diskusi mengenai isu-isu representatif, akuntabilitas dan responsibilitas politik.

Tingkat Demokrasi dan Keterlibatan Aktivis Dalam Aktivisme Transnasional

Studi-studi mengenai demokrasi secara tipikal dikenal dengan pertumbuhan keterlibatan masyarakat sipil yang berhubungan dengan proses demokratisasi. Kelompok masyarakat sipil adalah aktor penting dalam perjuangan demokrasi dan pada saat terjadi transisi terhadap rejim demokratik formal, secara umum ada ruang lebih bagi aktivitas masyarakat sipil. Sistem politik secara institusi akan lebih terbuka, represif negara juga semakin berkurang dan ada kemungkinan untuk membentuk aliansi dengan aktor-aktor elit (cf. McAdam 1996) yang berasosiasi dengan sistem konstitusi politik demokrasi untuk aktivisme masyarakat sipil. Peluang –peluang politik domestik tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan politik lokal nasional namun juga aktivisme transnasional.

Sebuah proses demokratisasi menggiring terjadinya peningkatan keterlibatan aktivisme transnasional karena para aktivis melihat masalah-masalah domestik kurang mendapatkan perhatian dibandingkan masalah-masalah eksternal. Transisi rejim demokratik formal, gerakan pro-demokrasi ditandai dengan adanya mobilisasi dan keterlibatan aktivis terhadap isu-isu tersebut, termasuk juga keterlibatan para aktivis dalam persoalan-persoalan luar negeri

maupun transnasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan hampir semua aktivis transnasional berasal dari negara-negara demokrasi.

Sistem politik autoritarian bisa juga merangsang terjadinya aktivisme transnasional. Ketika peluang politik domestik relatif sedikit, para aktivis akan mencoba mengambil kesempatan untuk terlibat dalam politik transnasional (Uhlir 2001), kemudian seperti apa yang diungkapkan oleh Keck and Sikkink (1998) menyebut dengan sebutan “boomerang pattern”. Pola yang sangat dekat dan identik dengan rejim autoritarian yang represif (seperti Korea Utara atau Burma), yang memberi sedikit sekali ruang bagi beragam bentuk aktivisme sipil baik itu dalam skala lokal, nasional maupun transnasional. Sebuah rejim semi autoritarian seperti Malaysia memiliki skala yang relatif tinggi terhadap gerakan aktivisme transnasional.

Sistem politik di Malaysia cukup memberi ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil, namun pemerintah Malaysia memberi respon yang cukup keras bagi banyak kelompok masyarakat sipil sehingga membuat banyak aktivis Malaysia yang pada akhirnya berjuang untuk mencari aliansi di luar negeri. Kombinasi dari autoritarian dan demokrasi terimplementasi di Malaysia dan ini menjelaskan munculnya sejumlah aktivitas transnasional diantara aktivis Malaysia. Tingginya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan serta akses untuk mendapatkan informasi teknologi, juga membantu masyarakat Malaysia terlibat dalam aktivisme transnasional

Malaysia yang semi demokratik, merupakan ibu kota negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang diidentifikasi sebagai “potret lain dari aktivisme

transnasional”. Bangkok, Manila dan Jakarta tidak hanya menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh jaringan NGO transnasional, namun juga iklim politik yang mendukung perkembangannya. Di Singapura, justru sebaliknya, negara begitu kuatnya mengontrol aktivitas/gerakan sipil dan sedikit sekali memberi ruang bagi aktivisme transnasional. Hal yang sama juga terjadi di Taiwan, dan ini menjelaskan bahwa transnasionalisasi bagi kelompok masyarakat sipil berhubungan erat dengan proses demokratisasi. Dibawah rejim autoritarian terdapat sedikit sekali jaringan transnasional.

Sebagai kesimpulannya, banyak studi menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di sebuah negara berkontribusi terhadap berkembangnya dan munculnya aktivisme transnasional dimana masyarakat sipilnya terlibat. Lebih lanjut, studi-studi dari aktivisme transnasional sudah seharusnya memberi porsi lebih terhadap isu demokrasi. Sehingga, studi-studi aktivisme transnasional akan lebih berintegrasi dengan studi-studi mengenai demokrasi.

Aktivisme Transnasional dan Proses Demokratisasi

Meskipun “dimensi internasional” dari proses demokratisasi tidak lagi menjadi perhatian utama sebagaimana sebelumnya, beberapa studi demokrasi konvensional memberi perhatian pada peran aktor-aktor transnasional. Sayangnya, dalam proses globalisasi mengaburkan antara faktor internal dan eksternal, oleh karena itu, proses transnasional menjadi penting untuk dibahas. Penelitian mengenai aktivisme transnasional menunjukkan bagaimana aktivis transnasional (bekerjasama dengan aktivis lokal demokrasi) mencoba untuk

mempromosikan proses demokratisasi di beberapa negara, khususnya di Amerika Latin

Escobar and Alvarez 1992; Alvarez, Dagnino and Escobar 1998).

Banyak dari riset yang ada, lebih memfokuskan penelitian pada isu yang berhubungan dengan hak asasi manusia dibandingkan dengan demokratisasi (e.g. Risse, Ropp and Sikkink 1999). Demokrasi, tidak hanya melibatkan isu hak asasi manusia, namun juga persoalan warganegara, yang secara sejarah adalah sebuah konsep kurang mendapat porsi perhatian di Asia. Bagaimanapun, melalui aktivisme, satu tipe kewarganegaraan, khususnya di negara-negara tertentu yang memiliki sejarah kolonialisme, gerakan kemerdekaan dan rejim authoritarian.

Jemadu menjabarkan analisa mengenai usaha yang dilakukan oleh aktivis transnasional untuk mempromosikan demokratisasi di Indonesia. Dengan memfokuskan pada aspek-aspek demokrasi seperti pemilihan umum, “pemerintahan yang baik”, dan hak asasi manusia, secara eksplisit Jemadu menggambarkan studi aktivisme transnasional dalam konteks penelitian demokratisasi konvensional. Jemadu tidak hanya menunjukkan bahwa aktivis transnasional berpengaruh terhadap transisi rejim di Indonesia, namun juga menyimpulkan bahwa mereka gagal mencegah politisi dan militer dari transformasi proses demokratisasi kedalam permainan tanpa akhir dari bargaining birokratik.

Secara umum, dapat disampaikan bahwa faktor-faktor berkembangnya masyarakat sipil transnasional dipengaruhi oleh demokratisasi nasional termasuk eksistensi norma-norma regional terhadap isu demokratisasi, perkembangan isu

demokrasi membantu aktivis transnasional bergerak dan mengakses informasi teknologi (Kumar 2000: 139- 40). faktor keempat yang mempengaruhi, perkembangan aktivisme transnasional adalah keberadaan gerakan demokrasi yang kuat diseluruh bagian dari sebuah negara. Tanpa adanya aktivis lokal, jaringan aktivis transnasional tidak dapat berkembang dengan baik. Jika perkembangan masyarakat sipil mampu mempengaruhi proses demokratisasi, maka demokrasi akan terimplementasi dengan baik dari lapisan paling bawah sampai dengan level nasional.

Kumar (2000: 137) mengungkapkan bahwa aktivisme transnasional mempromosikan demokratisasi nasional tidak hanya di Eropa namun juga di Amerika Latin, dimana norma-norma regional juga mendukung paham demokrasi. Dari data ini, didapat dua catatan. Pertama, pentingnya norma-norma internasional dalam perkembangan aktivisme transnasional. Norma-norma ini tanpa diragukan lagi memberi peluang politik yang lebih besar bagi aktivisme transnasional, meskipun memang aktivisme transnasional tetap bisa bergerak meskipun norma-norma ini ada atau tidak ada. Kedua, ada atau tidak adanya norma-norma regional. Norma demokrasi dan hak asasi manusia kurang mendapat porsi di wilayah Asia Tenggara, meskipun prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia cenderung sudah dipahami di kalangan masyarakat sipil, yang menggiring sering terjadinya perlawanan terhadap pemerintah. Lebih lanjut, penstudi demokratisasi (di Asia sebagaimana juga di wilayah belahan dunia yang lain) harus memberi perhatian lebih terhadap bagaimana aktivis transnasional mempengaruhi proses demokratisasi di level lokal dan nasional.

Aktivisme Transnasional dan Keputusan Transnasional Terkait Isu Demokrasi

Perlu untuk dicatat bahwa persoalan-persoalan utama demokrasi adalah struktur power dan isu-isu sosial dan politik dalam konteks global, dimana partisipasi, representasi dan legitimasi sudah terstruktur dengan baik di tingkat negara (O'Brien et al. 2000: 21-2). Bagaimana mengembangkan paham demokrasi diluar batas teritori menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Teori-teori masyarakat sipil dan demokrasi kosmopolitan berasumsi bahwa aktivisme transnasional mendukung demokratisasi baik pada skala transnasional maupun pada tingkat global (e.g. Falk 1995, Ch.4). Adanya benturan dalam pengambilan keputusan di era globalisasi, memberi peluang turunnya demokrasi. Dengan merancang kampanye yang ditargetkan di beberapa level, para aktivis transnasional memaparkan isu penurunan ruang demokrasi ini, baik secara implisit maupun secara eksplisit (Jordan and van Tuijl 2000: 2053).

Aktivis transnasional aktif di institusi-institusi internasional dengan menyuarakan berbagai ide yang selama ini kurang disuarakan (Sikkink 2002: 301). Para aktivis ini konsen pada agenda politik (Florini 2000a: 211). Mereka juga konsen mengamati ragam isu dalam sistem internasional (Edwards 2001: 7). Menurut Scholte (1999), masyarakat sipil transnasional dapat memperkuat gelombang demokrasi, dengan cara terlibat di pendidikan, menekan pemerintah secara politik untuk meminta transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, masyarakat sipil transnasional menfenisikan ulang batasan-batasan demokrasi dalam ruang politik (cf. McGrew 1997: 13)

Hal ini terkait dengan perkembangan demokrasi kosmopolitan sebagaimana yang disebutkan oleh Held (1995). Pandangan Held mengenai demokrasi kosmopolitan adalah perkembangan dari demokrasi liberal pada level global, Held juga membicarakan teori-teori partisipasi demokrasi (Dryzek 1999: 32). Meskipun fokus utama Held adalah lebih pada formalisasi institusi bagi pemerintahan dunia (Held 1995: 237, 281), memaparkan bahwa gerakan level bawah transnasional menciptakan ruang politik bagi perkembangan demokrasi kosmopolitan. Hal ini masih perlu dielaborasi, dan teori Held mengenai kosmopolitan demokrasi dikritisi sebagai utopian dan tidak mampu menjawab beragam pertanyaan mengenai ketidaksetaraan power ekonomi dan sosial. Teori ini mengabaikan power negara.

Menggunakan pendekatan demokrasi transnasional lebih besar mendapat perhatian dalam studi aktivisme transnasional jika dibandingkan dengan demokrasi kosmopolitan Held. Dryzek (1999) fokus pada kemungkinan bagi demokratisasi dalam sistem pemerintahan global yang sudah eksis, meskipun kehadiran pemerintahan global di masa yang akan datang juga masih perlu dipertanyakan. Dryzek memberi argumen bahwa sumber daya pemerintah masih dalam perdebatan (Dryzek 1999: 33). Seperti yang sudah dibahas sebelumnya “perangkat lunak/ software institusional” menjadi lebih penting dibandingkan perangkat keras /hardware institusional (Dryzek 1999: 35).

Diskusi ini memaparkan bahwa adanya pesimisme terhadap prospek demokrasi transnasional melalui aktivisme transnasional. Selanjutnya, perluasan demokrasi di tingkat transnasional maupun level global lebih mudah jika

memandang demokrasi sebagai sebuah proses penyampaian dibanding jika memandang demokrasi sebagai proses yang terkait dengan voting dan perwakilan. Model Komunikatif dari demokrasi lebih mudah beroperasi melewati batas-batas teritorial (Dryzek 1999: 44). Jaringan adalah hal yang paling menjanjikan untuk menyebarkan demokrasi (Dryzek 1999: 46).

Kritikan muncul dari Colas (2002: 158) yang berpendapat bahwa teori-teori jarang diperhatikan oleh para agen transnasional terhadap demokrasi karena (1) mereka mengabaikan pentingnya demokrasi menjadi dasar di komunitas masyarakat, dan (2) dengan memisahkan negara dari konteks sosial ekonomi yang lebih luas termasuk penyebaran paham demokrasi. Sesuai dengan argumen Grugel bahwa ada fakta bahwa masyarakat cenderung memilih aktivitas transnasional dibanding nasional. Bagi para aktivis memotong jalur pemerintahan bukanlah sesuatu yang mudah (Grugel p.39). namun, masalahnya bukanlah pada pilihan antara demokrasi nasional atau transnasional. Proses demokratisasi pada level yang berbeda seringkali terlalu dipaksakan oleh kelompok aktivis pro-demokrasi dari level lokal sampai pada level global.

Penutup

Menganalisa hubungan antara aktivisme transnasional dan demokrasi bukanlah masalah menjelaskan bagaimana tipe aktivisme mempengaruhi demokrasi pada level nasional maupun transnasional. Kehadiran masyarakat sipil transnasional memunculkan berbagai pertanyaan mengenai konstituen, mandat, status perwakilan dan akuntabilitas aktor-aktor masyarakat sipil. Secara umum dapat diketahui bahwa masyarakat sipil global banyak terkonsentrasi di Utara-

Barat. Utara banyak di dominasi jaringan aktivis transnasional, meskipun tidak sempurna, ada partisipasi yang menarik dari “Global South” dalam masyarakat sipil transnasional. Dominasi Utara yang menjadi basis aktivis di banyak jaringan transnasional menampilkan masalah perwakilan. Hal ini bukan hanya persoalan distribusi geografis.

Masalah demokrasi mungkin lebih krusial dalam organisasi-organisasi gerakan sosial dan perubahan sosial yang merubah orientasi jaringan transnasional, jika dibandingkan dengan NGOs transnasional. Selain persoalan demokrasi, para aktivis transnasional memandang perlunya otoritas moral didasarkan pada imparsialitas atau independensi, reliabilitas, perwakilan, akuntabilitas dan transparansi.

Masalah perwakilan hanya dapat diselesaikan dengan menciptakan institusi-institusi perwakilan dalam masyarakat global, namun hingga kondisi ini sudah tercapai, aktivis transnasional mencoba untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingan konstituen mereka dan mendapat dukungan publik bagi aktivitas mereka meskipun mereka belum memiliki hak secara formal untuk bertindak dalam cara tertentu. Jika dibandingkan dengan institusi pemerintah global, sistem negara internasional dan kapitalisme global, jaringan aktivis transnasional lebih mampu bekerja secara maksimal dalam demokrasi.

Daftar Pustaka

Alvarez, S.E., Dagnino, E. and Escobar, A. (eds) (1998) *Cultures of Politics – Politics of Cultures: Re-visioning Latin American Social Movements*. Boulder: Westview Press.

Anderson, J. (2002) 'Questions of Democracy, Territoriality and Globalisation', in J. Anderson (ed.), *Transnational Democracy – Political Spaces and Border Crossings*, London: Routledge.

Anheier, H., Glasius, M. and Kaldor, M. (2001) 'Introducing Global Civil Society', in H. Anheier, M. Glasius and M. Kaldor (eds) *Global Civil Society 2001*, Oxford: Oxford University Press.

Appadurai, A. (2000) 'Grassroots Globalization and the Research Imagination', *Public Culture* 12(1): 1–19.

Aviel, J.F. (2000) 'Placing Human Rights and Environmental Issues on ASEAN's Agenda: The Role of Non-Governmental Organizations', *Asian Journal of Political Science* 8(2): 17– 34.

Boli, J. and Thomas, G.M. (eds) (1999) *Constructing World Culture. International Nongovernmental Organizations since 1875*, Stanford: Stanford University Press.

Braman, S. and Sreberny-Mohammadi, A. (eds) (1996) *Globalization, Communication and Transnational Civil Society*, Cresskill, NJ: Hampton Press.

Brecher, J., Costello, T. and Smith, B. (2002) *Globalization from Below. The Power of Solidarity*, Cambridge, MA: South End Press.

Burawoy, M., George, S., Gille, Z., Gowen, T., Haney, L., Klawitter, M., Lopez, S.H., Riain, S. and Thayer, M. (2000) *Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World*, Berkeley, CA: University of California Press.

Castells, M. (1996) *The Rise of the Network Society*, Cambridge, MA: Blackwell Publishers.

Cohen, R. and Rai, S.M. (eds) (2000) *Global Social Movements*, London: Athlone Press.

Colás, A. (2002) *International Civil Society. Social Movements in World Politics*, Cambridge: Polity Press.

Comor, E. (2001) 'The Role of Communication in Global Civil Society: Forces, Processes, Prospects', *International Studies Quarterly* 45: 389–408.

Cullen, H. and Morrow, K. (2001) 'International Civil Society in International Law: The Growth of NGO Participation', *Non-State Actors and International Law* 1: 7–39.

Delanty, G. (2000) *Citizenship in a Global Age*, Buckingham: Open University Press.

della Porta, D., Kriesi, H. and Rucht, D. (eds) (1999) *Social Movements in a Globalizing World*, London: Macmillan.

Dryzek, J. S. (1999) 'Transnational Democracy', *Journal of Political Philosophy*, 7(1): 30–51.

Edwards, M. (2001) 'Introduction', in M. Edwards and J. Gaventa (eds) *Global Citizen Action*, London: Earthscan Publications.

Edwards, M. and Gaventa, J. (eds) (2001) *Global Citizen Action*, London: Earthscan Publications.

Escobar, A. and Alvarez, S.E. (eds) (1992) *The Making of Social Movements in Latin America – Identity, Strategy, and Democracy*, Boulder: Westview Press.

Falk, R. (1995) *On Humane Governance. Toward a New Global Politics*, Cambridge: Polity Press.

——(1999) *Predatory Globalization – A Critique*, Cambridge: Polity Press.

Florini, A. M. (2000a) 'Lessons Learned', in A. M. Florini (ed.) *The Third Force. The Rise of*

22 *Nicola Piper and Anders Uhlin Transnational Civil Society*, Tokyo: Japan Center for International Exchange and Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Florini, A. M. (ed.) (2000b) *The Third Force. The Rise of Transnational Civil Society*, Tokyo: Japan Center for International Exchange and Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Fortun, K. (2001) *Advocacy after Bhopal. Environmentalism, Disaster, New Global Orders*, Chicago and London: University of Chicago Press.

Freres, C. L. (1999) 'European Actors in Global Change. The Role of European Civil

Societies in Democratization', in J. Grugel (ed.) *Democracy Without Borders. Transnationalization and Conditionality in New Democracies*, London and New York: Routledge.

Gaventa, J. (2001) 'Global Citizen Action: Lessons and Challenges', in M. Edwards and J. Gaventa (eds) *Global Citizen Action*, London: Earthscan Publications.

Gills, B.K. (ed.) (2000) *Globalization and the Politics of Resistance*, Basingstoke: Macmillan.

Görg, C. and Hirsch, J. (1998). 'Is International Democracy Possible?', *Review of International Political Economy* 5(4): 585–615.

Grugel, J. (1999) 'Contextualizing Democratisation: The Changing Significance of

Transnational Factors and Non-State Actors', in J. Grugel (ed.) *Democracy Without Borders.*

Transnationalization and Conditionality in New Democracies, London and New York: Routledge.

Guidry, J. A., Kennedy, M.D. and Zald, M.N. (2000a) 'Globalizations and Social Movements', in J.A. Guidry, M.D. Kennedy and M.N. Zald (eds) *Globalizations and Social*

Movements. Culture, Power, and the Transnational Public Sphere, Ann Arbor: University of

Michigan Press.

Guidry, J. A., Kennedy, M.D. and Zald, M.N. (eds) (2000b) *Globalizations and Social Movements. Culture, Power, and the Transnational Public Sphere*, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Gurowitz, A. (2000) 'Migrant Rights and Activism in Malaysia: Opportunities and Constraints', *Journal of Asian Studies* 59(4): 863–88.

Hamel, P., Lustiger-Thaler, H., Nederveen Pieterse, J. and Roseneil, S. (eds) (2001) *Globalization and Social Movements*, Houndmills, Basingstoke: Palgrave.

Hannerz, U. (1996) *Transnational Connections. Culture, People, Places*, London and New York: Routledge.

He, B. (1999) 'The Role of Civil Society in Defining the Boundary of a Political Community: The Cases of South Korea and Taiwan', *Asian Studies Review* 23(1): 27–48.

Held, D. (1995) *Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Cambridge: Polity Press.

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. (1999) *Global Transformations. Politics, Economics and Culture*, Oxford: Polity Press.

Higgott, R.A., Underhill, G.R.D. and Bieler, A. (eds) (2000) *Non-State Actors and Authority in the Global System*, London and New York: Routledge.

Hulme, D. and Edwards, M. (eds) (1997) *NGOs, States and Donors. Too Close for Comfort?*, Basingstoke and London: Macmillan (in association with Save the Children Fund).

Jordan, L. and van Tuijl, P. (2000) 'Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy', *World Development* 28(1)2: 2051–65.

Kaldor, M. (1999) 'Transnational Civil Society', in T. Dunne and N.J. Wheeler (eds) *Human Rights in Global Politics*, Cambridge: Cambridge University Press. *New perspectives on transnational activism* 23

Keck, M.E. and Sikkink, K. (1998) *Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics*, Ithaca and London: Cornell University Press.

Khagram, S., Riker, J.V. and Sikkink, K. (2002a) 'From Santiago to Seattle: Transnational Advocacy Groups Restructuring World Politics', in S. Khagram, J.V. Riker and K. Sikkink (eds) *Restructuring World Politics. Transnational Social Movements, Networks, and Norms*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Khagram, S., Riker, J.V. and Sikkink, K. (eds) (2002b) *Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kumar, C. (2000) 'Transnational Networks and Campaigns for Democracy', in A. M. Florini (ed.) *The Third Force. The Rise of Transnational Civil Society*, Tokyo: Japan Center for International Exchange and Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Lizee, P.P. (2000) 'Civil Society and Regional Security: Tensions and Potentials in Post-Crisis Southeast Asia', *Contemporary Southeast Asia* 22(3): 550–69.

McAdam, D. (1996) 'Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions', in D. McAdam, J.D. McCarthy and M.N. Zald (eds) *Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, Cambridge: Cambridge University Press.

McGrew, A. (1997) 'Globalization and Territorial Democracy: An Introduction', in A. McGrew (ed.) *The Transformation of Democracy? Globalization and Territorial Democracy*, Cambridge: Polity Press; Milton Keynes: Open University.

Markoff, J. (1996) *Waves of Democracy. Social Movements and Political Change*, Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Mittelman, J. H. (1999) 'Resisting Globalisation: Environmental Politics in Eastern Asia', in K. Olds, P. Dicken, P. F. Kelly, L. Kong and H. W. Yeung. (eds) *Globalization and the Asia-Pacific*, London: Routledge.

Nelson, P. J. (2002) 'Agendas, Accountability, and Legitimacy among Transnational Networks Lobbying the World Bank', in S. Khagram, J. V. Riker and K. Sikkink (eds)

Restructuring World Politics. Transnational Social Movements, Networks, and Norms, Minneapolis: University of Minnesota Press.

O'Brien, R., Williams, M., Goetz, A.M. and Scholte, J.A. (2000) *Contesting Global Governance – Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements*, Cambridge: Cambridge University Press.

Piper, N. and Uhlin, A. (2002) 'Transnational Advocacy Networks, Female Labour Migration and Trafficking in East and Southeast Asia. A Gendered Analysis of Opportunities and Obstacles', *Asian and Pacific Migration Journal* 11(2): 171–95.

Princen, T. and Finger, M. (eds) (1994) *Environmental NGOs in World Politics. Linking the Local and the Global*, London and New York: Routledge.

Riles, A. (2000) *The Network Inside Out*, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Risse, T., Ropp, S.C. and Sikkink, K. (eds) (1999) *The Power of Human Rights. International Norms and Domestic Change*, Cambridge: Cambridge University Press.

Risse-Kappen, T. (ed.) (1995) *Bringing Transnational Relations Back In. Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions*, Cambridge: Cambridge University Press.

Rucht, D. (1999) 'The Transnationalization of Social Movements: Trends, Causes, Problems', in D. della Porta, H. Kriesi and D. Rucht (eds), *Social Movements in a Globalizing World*, London: Macmillan, pp. 206–22.

——(2001) 'Transnationaler politischer Protest im historischen Laengsschnitt', in A. Klein, R. Koopmans and H. Geiling (eds), *Globalisierung, Partizipation, Protest*. Opladen: Leske & Bude, pp. 77–96.

Scholte, J.A. (1999) 'Global Civil Society: Changing the World?', University of Warwick, Coventry: Centre for the Study of Globalization and Regionalisation, Working Paper No. 31/99.

Smith, J. (2000) 'Social Movements, International Institutions and Local Empowerment', in

K. Stiles (ed.) *Global Institutions and Local Empowerment. Competing Theoretical Perspectives*, Houndmills, Basingstoke: Macmillan and New York: St Martin's Press.

——(2001) 'Globalizing Resistance: The Battle of Seattle and the Future of Social Movements', *Mobilization* 6(1): 1–19.

Smith, J. and Johnston, H. (eds) (2002) *Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements*, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Smith, J., Chatfield, C. and Pagnucco, R. (eds) (1997) *Transnational Social Movements and Global Politics. Solidarity Beyond the State*, New York: Syracuse University Press.

Smith, M.P. and Guarnizo, L.E. (eds) (1998) *Transnationalism from Below*, New Brunswick and London: Transaction Publishers.

Tarrow, S. (1998) *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*, 2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press.

——(2001) 'Transnational Politics: Contention and Institutions in International Politics', *Annual Review of Political Science* 4: 1–20.

——(2002) 'The New Transnational Contention: Organizations, Coalitions, Mechanisms', paper presented at the APSA Annual Meeting, Boston, 31 August–1 September 2002.

Uhlin, A. (2001) 'The Transnational Dimension of Civil Society. Migration and Independence Movements in Southeast Asia', in B. Beckman, E. Hansson and A. Sjögren (eds) *Civil Society and Authoritarianism in the Third World*, Stockholm: PODSU/Stockholm University.

——(2002) 'Globalization, Democratization and Civil Society in Southeast Asia. Observations from Malaysia and Thailand', in C. Kinnvall and K. Jönsson (eds) *Globalization and Democratization in Asia*, London: Routledge.

Uvin, P. (2000) 'From Local Organizations to Global Governance: The Role of NGOs in